
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILU 2024 DI DESA TENDAMBONGGI, KECAMATAN ENDE, KABUPATEN ENDE

¹⁾Maria Falensia Sedho

^{2*)}Richardus Beda Toulwala

¹⁻²⁾Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM) Santa Ursula, Ende, Indonesia

*Corresponding Email: richard1301leuwayan@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang menyebabkan penurunan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu 2024, khususnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Desa Tendambonggi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris kualitatif, yang berfokus pada pemahaman sebab-akibat terkait penurunan partisipasi politik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara/interview dan analisis dokumentasi. Dalam menganalisis fenomena tersebut, kajian ini mengacu pada konsep partisipasi politik yang dikemukakan oleh Michael Rush dan Philip Athoff. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tendambonggi belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai politik, karena nilai-nilai politik yang diterapkan dianggap tidak relevan dengan kehidupan mereka. Akibatnya, masyarakat cenderung memilih tanpa dasar yang rasional dan kurang memahami substansi politik. Selain itu, status sosial dan ekonomi turut memengaruhi kepercayaan politik masyarakat. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani, sehingga mereka lebih mengutamakan kebutuhan ekonomi daripada keterlibatan dalam kegiatan politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman politik yang rendah dan tekanan ekonomi menjadi faktor utama penurunan partisipasi politik dalam Pemilu 2024.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Partisipasi Masyarakat, Pilpres, Pemilu 2024.

ABSTRACT

This research aims to identify the factors that cause a decrease in community political participation in the 2024 elections, especially in the presidential and vice presidential elections in Tendambonggi Village, Ende District, Ende Regency. The type of research used is qualitative explanatory research, which focuses on understanding the causes and effects related to the decline in political participation. Data collection was carried out through interviews and documentation. In analyzing this phenomenon, this research refers to the theory of political participation put forward by Michael Rush and Philip Athoff. The results of the research show that the people of Tendambonggi Village do not have an adequate understanding of politics, because the political values they apply are considered irrelevant to their lives. As a result, people tend to vote without a rational basis and lack understanding of political substance. Apart from that, social and economic status also influences people's political beliefs. The results of research in the field show that the majority of people work as farmers, so they prioritize economic needs over involvement in political activities. This research concludes that low political understanding and economic pressure are the main factors in reducing political participation in the 2024 elections.

Keywords: Political Participation, Community Participation, Presidential Election, 2024 Election.

PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan demokrasi, dimana kebijakan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam sistem ini, masyarakat memiliki peran penting, terutama dalam proses politik. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat adalah partisipasi dalam pemilihan umum (Pemilu), yang dilaksanakan setiap lima tahun untuk memilih pemimpin eksekutif di tingkat pusat (Purnamawati, 2020).. Memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih calon pemimpin pemilu yang mereka anggap dapat mewakili kepentingan mereka, sehingga berperan dalam menentukan arah kebijakan negara (Siagian et al., 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Pemilu langsung oleh rakyat merupakan pelaksanaan kesetaraan rakyat yang bertujuan membentuk pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, mengutamakan asas langsung, umum, bebas, kerahasiaan, jujur, dan adil, memastikan partisipasi masyarakat yang maksimal. Undang-Undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, yang mengatur lebih rinci proses pemilihan presiden, termasuk persyaratan calon, tahapan pemilihan, mekanisme pencalonan, kampanye, dan penyelesaian pemungutan suara (Jafar et al., 2024). Partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat penting dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi. Keikutsertaan masyarakat dalam memilih pemimpin atau wakil mereka di parlemen menunjukkan bahwa negara tersebut telah berupaya mempraktikkan prinsip demokrasi (Husain et al., 2023). Pemilu tidak hanya menjadi sarana formalitas demokrasi, melainkan juga menjadi indikator legitimasi hasil pemilu. Tingkat legitimasi ini berhubungan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu, yang akan menentukan pemimpin atau wakil rakyat yang akan menduduki jabatan tertentu (Gusman, 2023; Muhiddin, 2013).

Herbert McClosky dalam pandangannya (Agus, 2019), mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktivitas sukarela dari warga negara untuk ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin dan pembentukan kebijakan publik. Partisipasi ini mencakup kegiatan aktif seperti memberikan suara dalam pemilu legislatif, pemilihan presiden, maupun kepala daerah. Pemberian suara dalam pemilu merupakan hak setiap warga negara yang dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun (Damsar, 2018; Elly M Setiadi, 2013). Meski demikian, tidak semua warga negara terlibat dalam aktivitas politik. Berbagai faktor memengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang. Menurut (Surbakti, 1998) salah satu faktor yang memengaruhi partisipasi politik adalah tingkat kesadaran politik terhadap pemerintah. Hal ini mencakup pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai warga negara serta penilaian terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Selain itu, kepercayaan terhadap politik juga memainkan peran penting. Faktor ini mencakup tingkat pengetahuan dan keyakinan masyarakat terhadap informasi politik yang mereka terima. Sikap masyarakat terhadap kegiatan politik, termasuk perasaan suka atau tidak suka, juga memengaruhi tingkat keterlibatan mereka dalam politik. Kesadaran politik, yang melibatkan pemahaman dan perhatian terhadap sistem politik, menjadi aspek penting lainnya. Akhirnya, status sosial dan ekonomi turut berperan, di mana kelompok dengan status ekonomi rendah cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah karena keterbatasan waktu dan sumber daya untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik (Elly M Setiadi, 2013).

Dengan demikian, pemilu di Indonesia tidak hanya menjadi sarana formal bagi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya, tetapi juga menjadi bagian integral dari demokrasi yang sehat. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa warga negara dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam Pemilu mencerminkan tingkat keterlibatan mereka dalam proses

demokrasi, yang menjadi salah satu indikator keberhasilan sistem politik negara. Oleh karena itu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu merupakan upaya yang harus terus diperjuangkan, baik melalui pendidikan politik, peningkatan kepercayaan terhadap sistem pemilu, maupun penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban politik mereka .

Sejumlah alasan yang memengaruhi partisipasi politik, seperti kesadaran politik, kepercayaan politik, sikap, dan status sosial-ekonomi, tidak hanya berlaku secara umum, tetapi juga dialami oleh masyarakat di tingkat lokal, termasuk di Desa Tendabonggi, Kecamatan Ende. Di Desa Tendabonggi pada pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 259 orang dengan komposisi 104 pemilih laki-laki dan 155 pemilih perempuan. Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 199 orang, dengan komposisi 85 pemilih laki-laki dan 114 pemilih perempuan. Sedangkan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 60 orang, dengan komposisi 19 pemilih laki-laki dan 41 pemilih perempuan. Hal ini dapat dilihat pada tabel yang merepresentasikan data pemilih tetap dan partisipasi pemilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 di Desa Tendabonggi:

Tabel 01.

Data Pemilih Pemilu Tahun 2024 di Desa Tendabonggi

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT	104	155	259
Pemilih dalam Salinan DPT yang Menggunakan Hak Pilih	85	114	199
Pemilih dalam Salinan DPT yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	19	41	60

Data di atas memberikan gambaran umum mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi nasional dengan tingkat ketidakikutsertaan sebesar sekitar 23,17%. Angka ini dapat menjadi indikator adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilih mereka. Dengan demikian, penting untuk mencermati lebih lanjut alasan ketidakikutsertaan ini. Dalam konteks pemilihan umum, ketidakikutsertaan dapat menunjukkan masalah dalam tingkat pendidikan pemilih, kesadaran politik, atau aksesibilitas pemilu. Dengan demikian, penjelasan artikel ini difokuskan pada alasan yang mempengaruhi ketidakikutsertaan masyarakat dalam pemilu, dengan menguraikan pada beberapa hal, seperti tingkat kesadaran politik masyarakat, kepercayaan, sosial dan ekonomi.

LANDASAN TEORI

Partisipasi Politik

Menurut Michael Rush (2005), partisipasi politik merujuk pada keterlibatan individu dalam berbagai tingkatan dalam sistem politik, yang dapat bervariasi mulai dari ketidakterlibatan hingga posisi politik tertentu. Tingkat partisipasi politik berbeda antar individu dan masyarakat, serta dapat berubah dalam masyarakat yang sama. Partisipasi politik juga dapat memotivasi individu untuk memperluas keterlibatannya, termasuk pada

tingkat partisipasi yang lebih tinggi. Bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, serta tingkat kepuasan atau ketidakpuasan warga negara terhadap dinamika politik (Michael Rush, 2005).

Michael Rush (2005) mengidentifikasi berbagai bentuk partisipasi politik, di antaranya: 1) Menduduki jabatan administratif politik, yang melibatkan individu dalam struktur pemerintahan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik; 2) Mengangkat jabatan politik atau administratif melalui proses pemilihan atau penunjukan; 3) Terlibat sebagai anggota aktif dalam organisasi politik, seperti partai politik atau kelompok politik lainnya; 4) Menjadi anggota organisasi politik pasif tanpa keterlibatan aktif; 5) Partisipasi dalam rapat umum untuk berdiskusi dan mengambil keputusan politik; dan 6) Partisipasi dalam pemilihan umum dengan memilih pemimpin atau kebijakan politik.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik, menurut (Surbakti, 1998). Faktor utama adalah kesadaran politik, yaitu pemahaman individu tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta penilaian terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, yang dapat mempengaruhi perilaku politik. Selain itu, faktor-faktor lain yang mempengaruhi partisipasi politik, seperti: 1) Kepercayaan politik, yaitu pengetahuan dan keyakinan terhadap sistem politik; 2) Sikap terhadap aktivitas politik, yang mencakup perasaan positif atau negatif terhadap politik; 3) Kesadaran politik, yang berkaitan dengan pemahaman hak dan kewajiban serta perhatian terhadap lingkungan sosial-politik; dan 4) Status ekonomi dan sosial, di mana individu dengan status ekonomi dan sosial rendah cenderung memiliki partisipasi politik yang lebih rendah karena keterbatasan waktu dan sumber daya (Elly M Setiadi, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif eksplanatoris, yang bertujuan untuk memahami hubungan antar variabel serta mengidentifikasi hubungan sebab-akibat, sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2018), Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan penurunan partisipasi politik masyarakat Desa Tendambonggi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Unit analisis penelitian ini adalah pemilih di desa tersebut, yang sesuai dengan tujuan kajian. Pemilihan narasumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan kriteria tertentu agar data yang diperoleh representatif (Sugiyono, 2018),. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber, sementara dokumentasi digunakan untuk melengkapi data terkait. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema yang relevan. Selanjutnya, tema-tema tersebut dianalisis secara logis dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan untuk menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan partisipasi politik di Desa Tendambonggi. Dengan pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih mendalam sebagai sebuah kesimpulan mengenai penyebab penurunan partisipasi politik di Desa Tendambonggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Partisipasi Politik Masyarakat Desa Tendambonggi dalam Pemilu 2024****1. Masyarakat Belum Memahami Politik Dengan Baik**

Sejumlah faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Desa Tendambonggi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende adalah masyarakat Tendambonggi belum memahami politik dengan baik, karena nilai-nilai politik yang diterapkan kepada masyarakat sangat tidak relevan, sehingga masyarakat cenderung memilih berdasarkan faktor sosial. Dalam pemilihan banyak masyarakat yang memilih tidak secara cerdas dan tidak memahami tentang apa itu politik. Selain itu masyarakat Tendambonggi ada yang memahami politik dan tidak memahami politik. Dimana setiap orang menjalankan politik tidak suatu arah dan masing-masing memilih partai tersendiri. Masyarakat yang tidak memahami politik pada umumnya mengambil kesempatan dalam pemilihan sebagai wadah untuk mendapatkan keuntungan sehingga masyarakat hanya mengharapkan imbalan dari para calon (Hananda Avivah, 2023).

2. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Politik Masih Rendah

Kepercayaan politik akan terus dicapai ketika program kerja yang disampaikan di penuh oleh para politik. Status sosial dan ekonomi juga sangat mempengaruhi kepercayaan politik sehingga tidak bisa di abaikan dengan masyarakat yang belum memahami politik dan kepercayaan masyarakat terhadap politik masih rendah karena dilihat dari cara pandang visi misinya mulai berjalan dan bekerja sesuai program seperti yang disampaikan oleh para calon sebelum kampanye. Selain itu kepercayaan politik masyarakat terhadap para calon atau kandidat melihat dari para calon yang suka membaur atau berpartisipasi dalam kegiatan ditengah masyarakat umum. Kepercayaan politik masyarakat kepada kandidat melihat dari program kerja, visi misi, sikap atau perilaku dan bekerja di lembaga sebelumnya serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat (Hemafitria et al., 2021; Indrianya, 2020).

3. Masyarakat Lebih Mementingkan Ekonomi Daripada Politik

Ekonomi turut mempengaruhi masyarakat terlibat dalam kegiatan dan aktivitas politik. Karena banyak masyarakat yang mata pencaharian petani lebih mementingkan kebutuhan hidup dibandingkan kegiatan dalam pemilihan. Status ekonomi sangat berpengaruh, karena masyarakat banyak sekali melihat para vigurnya ketika mau pilih harus mempunyai uang, dan ketika tidak punya uang maka tidak pilih. Karena banyak vigur yang sebelum pemilihan terlebih dahulu melakukan kampanye para vigur menjanjikan masyarakat untuk membantu mewujudkan aspirasi masyarakat. Ternyata selesai pemilihan tidak sesuai yang dijanjikan dan hal itulah yang membuat masyarakat sangat kecewa. Selain itu status ekonomi sangat mempengaruhi, melihat dengan ekonomi masyarakat yang minim, maka kesempatan bagi para vigur untuk masuk dan mempengaruhi masyarakat dengan cara politik uang sangat mudah yaitu membagikan uang kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memilihnya (Khair et al., 2018; Sutrisno, 2017).

KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Desa Tendambonggi menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap politik masih terbatas, karena nilai-nilai politik yang diberikan kurang relevan dengan kehidupan mereka. Kepercayaan masyarakat terhadap politik dipengaruhi oleh faktor status sosial dan ekonomi, yang menunjukkan bahwa ketidakpahaman terhadap politik dapat terkait dengan kondisi sosial-ekonomi mereka. Penelitian ini menemukan bahwa status

ekonomi berperan penting dalam keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik, di mana mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi sehari-hari daripada partisipasi politik. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pemerintah desa meningkatkan upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pemilu. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mendorong mereka untuk lebih antusias dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum. Di sisi lain, masyarakat perlu menyadari pentingnya partisipasi mereka dalam pemilu, karena tingkat partisipasi yang tinggi menjadi indikator keberhasilan pemilu. Semakin besar partisipasi masyarakat, semakin baik kualitas pelaksanaan pemilu. Selain itu, pihak-pihak terkait dalam dunia politik diharapkan untuk lebih giat melakukan sosialisasi mengenai kebijakan ekonomi, agar masyarakat dapat memahami langsung dampak yang akan mereka rasakan jika turut berpartisipasi dalam pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Z. A. (2019). *Sosiologi Politik Filosofi, Kajian, Teori, dan Pemikiran Islam*. Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram.
- Damsar. (2018). *Pengantar Sosiologi Politik*.
- Elly M Setiadi, U. K. (2013). Pengantar Sosiologi Politik. In *Kencana Prenada Media Group*. Kencana Prenada Media Group.
- Gusman, D. (2023). Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Perwujudan Demokrasi Substantif. *UNES Law Review*, 5(3), 847–862. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.425>
- Hananda Avivah, A. H. (2023). Peran Masyarakat dalam Partisipasi Politik Menghadapi Pemilihan Umum tahun 2024. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa (JMKB)*, 3(1), 14–21.
- Hemafitria, H., Novianty, F. N. F., & Fitriani, F. (2021). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i1.45310>
- Husain, S., Haryono, D., Nurhamni, Nelpanus, & Melani, R. (2023). Partisipasi Pemilih Melalui Desa Peduli Pemilu Pada Pemilihan 2024 Di Kota Palu. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 34–46.
- Indriany, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 545–558.
- Jafar, M. U., Hadi, A., & Cahyadi, K. (2024). Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Desa Labuhan Aji Dalam Pemberian Suara Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(1), 62–71.
- Khair, M., Suud, S., & Rispawati, R. (2018). Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 5(2), 100–114. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v5i2.62>
- Michael Rush, P. A. (2005). Pengantar Sosiologi Politik. In *RajaGrafindo Persada*. RajaGrafindo Persada.
- Muhiddin, A. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Perda). *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.53>

- Purnamawati, E. (2020). PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA. *Journal Solusi*, 18(2), 251–264.
- Siagian, A. W., Ferian Fajar, H., & Alify, R. F. (2022). Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Legislatif*, 5(2), 101–114. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60561290>.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Surbakti, R. (1998). Memahami Ilmu Politik. In *PT Gramedia Widiasarana Indonesia*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sutrisno, C. (2017). Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 35–48. <https://doi.org/10.24269/v2.n2.2017.36-48>